



H. RAIS D. ADAM

BUPATI

SALIM J. TANASA

WAKIL BUPATI

RLPPD (Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN
2021**





RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) memuat capaian makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, dan inovasi daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah selama 1(satu) tahun.

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan.



Capaian kinerja makro menggunakan indicator kinerja makro sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Tahun 2020	Tahun 2021	Ket
1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,42	65,61	
2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	14,04	13,72	
3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	2,46	2,94	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-2,36	5,07	
5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	32,00*	33,93**	
6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	0,298	0,279	

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian kinerja pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan (Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial).

Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dengan 4 (empat) Indikator Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator	Tahun 2021	Presentase
1.	Pendidikan Anak Usia Dini : Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	4.586 3.945	86 %
2.	Pendidikan Dasar (SD) : Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar	12.595 11.666	93 %
3.	Pendidikan Dasar (SMP) : Jumlah Anak Usia 12-15 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 12-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	5.484 4.489	82 %
4.	Pendidikan Kesetaraan : Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	3945 236	6 %



Urusan kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dengan 12 (Dua belas) Indikator Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Persentase
1	2	3	4	6
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan swasta	2.459	1.839	74,8%
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	2.347	1.788	76,2 %
3.	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.953	1.940	99,3 %
4.	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	12.937	12.211	94,4%
5.	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	2.061	1.832	88,9%
6.	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	61.930		39,3 %
7.	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	6.185	2.431	39,3 %
8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.026	5.295	40,7%
9.	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.455	1.462	42,3 %
10.	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	208	170	81 %
11.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.863	197	10,57 %
12.	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama	3.157	1781	56,4 %



Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dilaksanakan oleh dinas Pkerjaan umum dengan 2 (Dua) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	SASARAN	REALISASI	PRESENTASI
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	120.142	103.646	86 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti	120.142	95.164	79 %

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dilaksanakan oleh dinas Pkerjaan umum dengan 2 (Dua) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA				
	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima rumah yang layak huni korban bencana	0	315	525	166 %
2.	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Jumlah Kepala Keluarga yang menerima Fasilitas Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	0	0 %

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Pol PP dengan 7 (Tujuh) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
	2	3	4	6
1.	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	12	8	67%
2.	Persentase Penegakan Perda	6	5	83,3 %
3.	Tersedianya layanan informasi rawan bencana	88.523	88.523	100 %
4.	Tersedianya layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	88.523	88.523	100%



5.	Tersedianya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.802	2.802	100%
6.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten / kota	2.26 km ²	2.26 km ²	100 %
7.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	100%

Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan 5(Lima) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi Dalam Tahun	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	60	20	33,33 %
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	252	252	100%
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	2.500	1.650	66%
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	41	0	0%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100	68	68%

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Hasil EPPD Atas LPPD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

- 1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2019 belum diumumkan.
- 2) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 belum diumumkan.



Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020 Kabupaten Banggai Kepulauan Mendapatkan Penilaian Disclamer.
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2021 Kabupaten Banggai Kepulauan Mendapatkan Penilaian WDP.
- 3) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 s/d tahun 2018, Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat penghargaan WTP sebanyak 8 kali, Tahun 2019 WDP, Tahun 2020 Disclaimer

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan pada tanggal 12 April 2021, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan 29 Nopember 2021.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Target Pendapatan	Rp. 850.389.382.552,00-
Realisasi Pendapatan	Rp. 857.381.199.315,34
Selisih	Rp. 6.991.816.763,34

Realisasi Pendapatan mencapai 100,82% melebihi dari target pendapatan Tahun 2021.

Target dan Realisasi Pendapatan

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	533.855.575.136,00	488.324.989.590,00	45.530.585.546,00	91,47
	Belanja Pegawai	321.604.825.812,00	308.168.941.166,00	13.435.884.646,00	95,82
	Belanja Barang dan Jasa	196.758.014.563,00	165.256.922.512,00	31.501.092.051,00	83,99
	Belanja Hibah	13.345.834.761,00	13.019.725.912,00	326.108.849,00	97,56
	Belanja Bantuan Sosial	2.146.900.000,00	1.879.400.000,00	267.500.000,00	87,54



2	Belanja Modal	149.764.527.766,22	121.975.205.216,00	27.789.322.550,22	81,44
	Belanja Modal Tanah	3.735.216.918,00	896.716.800,00	2.838.500.118,00	24,01
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.825.109.041,22	46.389.159.730,00	7.435.949.311,22	86,18
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.567.454.264,00	43.375.426.773,00	11.192.027.491,00	79,49
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.454.596.628,00	31.138.639.038,00	6.315.957.590,00	83,14
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	182.150.915,00	175.262.875,00	6.888.040,00	96,22
3	Belanja Tidak Terduga	11.827.741.800,76	225.348.494,00	11.602.393.306,76	1,91
	Belanja Tidak Terduga	11.827.741.800,76	225.348.494,00	11.602.393.306,76	1,91
4	Belanja Transfer	164.350.157.400,00	164.249.356.995,00	100.800.405,00	99,94
	Belanja Bagi Hasil	2.481.550.000,00	2.405.749.595,00	75.800.405,00	96,95
	Belanja Bantuan Keuangan	161.868.607.400,00	161.843.607.400,00	25.000.000,00	99,98
5	Belanja Daerah	859.798.002.103,00	774.774.900.295,00	85.023.101.808,00	90,11

Pendapatan Daerah tersebut berasal dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer tetapi meningkat pada sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target PAD yaitu sebesar Rp. 36.989.830.984,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) menurun sebesar Rp. 2.187.579.233,00,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp. 34.802.251.751,00 (Tiga puluh empat milyar delapan ratus dua juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan target Dana Transfer yang awalnya sebesar Rp. 811.622.385.816,00 (Delapan ratus sebelas milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) menjadi Rp. 795.552.575.800,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yaitu menurun sebesar Rp. 16.069.810.016,00 (Enam belas milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam belas rupiah). sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.034.555.001,00 (Dua puluh milyar tiga puluh empat



juta lima ratus lima puluh lima ribu satu rupiah) atau naik 100 % dari Rp. 0,00 (Nol rupiah) menjadi Rp. 20.034.555.001,00 (Dua puluh milyar tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu satu rupiah).

Target PAD menurun 5,64% karena mengalami perubahan pada sektor Hasil Retribusi Daerah yaitu berkurang sebesar Rp.3.167.000.000,00 (*Tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta rupiah*) sedangkan pada sector pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 55.500.000,00 (*Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) dan pada sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 923.920.767,00 (*Sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*). Target Dana Transfer yang mengalami penurunan sebesar 1,97% bersumber dari Dana Alokasi Umum yang berkurang sebesar Rp. 14.580.158.000,00 (*Empat belas milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan Dana Alokasi Khusus yang berkurang sebesar Rp. 5.786.928.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) serta mengalami peningkatan pada Pendapatan bagi hail sebesar Rp.4.285.301.984,00 (*Empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).

Sedangkan perubahan pada target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan pada Pendapatan Hibah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.20.034.555.001,00 (dua puluh milyar tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu satu rupiah).

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.454.214.697,00 atau setara dengan 9,08% dari Rp. 865.252.216.800,00 menjadi Rp. 859.798.002.103,00.

Belanja Operasi naik sebesar Rp. 32.508.593.373,00 (*Tiga puluh dua milyar lima ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau meningkat 6% dari target sebelumnya yaitu Rp. 501.346.981.763,00 (*Lima ratus satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) menjadi Rp. 533.855.575.136,00 (*Lima ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribua seratus tiga puluh enam rupiah*).

Pada Belanja Modal turun 15 % atau berkurang sebesar Rp. 27.347.219.198,00 (*Dua puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*) dari target



sebesar Rp. 177.111.746.964,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) menjadi Rp. 149.764.527.766,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; asumsi kenaikan gaji PNSD yang telah diperhitungkan pada awal tahun tidak dapat terealisasi akibat belum ditetapkannya regulasi yang melandasi.

Selanjutnya pada Belanja Tak Terduga dari target yang telah ditetapkan yakni Rp. 22.443.330.673,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) menurun 47 % atau menjadi Rp.11.827.741.801,00 (Sebelas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah).

5. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Maupun Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabelberikut ini:

NO (1)	UNIT KERJA (2)	JUDUL/IDE INOVASI (3)	
1.	BKPSDM	1.	SILAPEG
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.	SIPARAS CANTIK (Sistem Perpustakaan dan Arsip Katalog Induk Khusus)
		2.	DARSIP (Sadar Arsip)
		3.	GELIDE (Gearakan Literasi Desa)
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.	PUTRI SINTA PENEGAK
4.	Badan Pendapatan Daerah	1.	SIPAHOLIN (Sistem Pajak Hotel Online)
		2.	MANDATA BERSAMA (Manajemen Pendapatan Berbasis Masyarakat)
		3.	TASTOR (Tagih Setor)
		4.	Gerakan Ko' Tano dan Sipitung Mandiri
5.	RSUD Trikora	1.	Klien Santun RST
6.	Dinas Kominfo	1.	Bangga Pakai go.id
7.	BPKAD	1.	e-SPM
		2.	SILANGSAT (Sistem Informasi Langsung dan Cepat)



		3.	Penertiban Administrasi terhadap Pegawai yang Mutasi
8.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1.	MASKER ASN (Manajemen Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara)